

KEPENTINGAN MAROKO TERHADAP PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT ATAS KEDAULATANNYA DI SAHARA BARAT TAHUN 2020

Muhammad Irfan Nor Fauzan¹

Abstract: *The aim of this research is to analyze Morocco's interests in the United States' recognition of its sovereignty in Western Sahara in 2020. The author uses descriptive research with secondary data obtained through library research. The author uses the concept of national interests and the concept of recognition of sovereignty to form analysis results that are in accordance with the research objectives.*

Morocco has made various efforts to protect the Western Sahara region from outside influence, including normalization with Israel in 2020. This normalization provides many benefits for Morocco, including increasing Morocco's legitimacy in the international world regarding Western Sahara. Thus, the normalization of relations became a way for Morocco to reassert its claim to Western Sahara through recognition from the United States. Morocco's persistence in defending Western Sahara brings us to the fact that Western Sahara is an area rich in natural resources. Therefore, apart from wanting to unite the territories previously under the control of the Kingdom of Morocco in order to strengthen Moroccan politics in the region, Morocco also wants to gain economic benefits by managing the natural resources available in Western Sahara, because around 80% of Western Sahara's territory is in under Moroccan rule.

The research results show Morocco's interests in the United States' recognition of its sovereignty in Western Sahara, namely defense interests and economic interests. Therefore, the recognition of sovereignty granted by the United States gives Morocco strength in its claims to the territory.

Keywords: *Western Sahara, Morocco, Recognition of Sovereignty, National Interest, United States*

Pendahuluan

Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang terletak diantara Maroko di utara, Aljazair di timur laut, dan Mauritania di timur dan selatannya. Sebelum dijajah Spanyol, Sahara Barat lebih dulu dikuasai oleh dinasti Almoravid yang berkuasa di Maroko dari tahun 1040 - 1147, kemudian terus berlanjut melalui dinasti setelahnya hingga pada abad ke-19 (R. Michael, 2015). Pada tahun 1884, barulah Spanyol mendeklarasikan Sahara Barat sebagai wilayah protektoratnya, namun Maroko tidak mengakui deklarasi tersebut. Maroko pun terus mengklaim Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1956 oleh Perancis (Britannica, 2023).

Pada awal tahun 1970-an, berbabagi macam pemberontakan muncul di Sahara Barat sebagai bentuk perlawanan atas pendudukan Spanyol. Pemberontakan tersebut menyebabkan Spanyol harus menarik diri dari Sahara Barat pada tahun 1975. Melalui *Madrid Accords*, Spanyol membagi wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania tanpa melibatkan penduduk asli Sahara Barat yakni etnis Sahrawi (Britannica, 2023). Akhirnya hal ini menimbulkan konflik baru mengenai hak kepemilikan Sahara Barat. Setelah Spanyol pergi, Front Polisario sebagai perwakilan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : fauzanadynata27@gmail.com.

masyarakat Sahrawi memproklamkan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR), kemudian melanjutkan serangan mereka serta menolak bergabung dengan Maroko dan menginginkan kewenangan untuk membangun negaranya sendiri tanpa menjadi bagian dari kedaulatan Maroko (Jensen, G. 2013). Pada tahun 1979, Mauritania menyatakan untuk mundur dari perebutan wilayah itu, sehingga sebagai tanggapannya Maroko segera mencaplok wilayah Sahara Barat bagian Mauritania (Maddy Weitzman, 1991). Kedua bagian wilayah Sahara Barat dipisahkan satu sama lain dengan tembok pasir yang dibangun dan diawasi oleh tentara Maroko. Sampai dengan hari ini wilayah Sahara Barat masih menjadi wilayah sengketa antara Maroko dan Front Polisario (Africanews, 2023).

Konflik di Sahara Barat yang terjadi antara Maroko dan Front Polisario menjadi persoalan yang rumit karena melibatkan negara lain yang memiliki kepentingan disana. Seperti Aljazair yang memiliki kepentingan ekonomi pada daerah pertambangan fosfat di Bou Craa dan pelabuhan Al Ayoun. Itulah sebabnya Aljazair mendukung sepenuhnya kemerdekaan SADR dan menjadi pemasok utama Front Polisario (David, 1977). Kemudian kehadiran Amerika Serikat setelah mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat melalui normalisasi Maroko dan Israel pada tahun 2020 juga didasari oleh kepentingan ekonomi. Penjualan alat perang Amerika Serikat kepada Maroko mengalami peningkatan dari sebelumnya, itu terjadi setelah Amerika Serikat mengakui Sahara Barat bagian dari kedaulatan Maroko (Singer, 2021).

Amerika Serikat setuju mengakui Sahara Barat adalah bagian dari kedaulatan Maroko yang tertuang pada *Joint Declaration* sebuah dokumen formal atas normalisasi Maroko dan Israel yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Maroko, dan Israel di kedutaan besar Amerika Serikat di kota Rabat, Maroko pada 22 Desember 2020. Berlanjutnya hubungan diplomatik Maroko dan Israel di tahun 2020 merupakan sebuah momen yang penting bagi Maroko. Sebelumnya, Amerika Serikat mendukung resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mengakui status Sahara Barat sebagai wilayah yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Sehingga pengakuan ini merupakan perubahan kebijakan yang signifikan dari Amerika Serikat yang sebelumnya bersikap netral (Richard, 2023). Pengakuan tersebut adalah pengakuan internasional pertama atas klaim Maroko di Sahara Barat.

Sementara itu, dengan adanya normalisasi ini keputusan Raja Mohammed VI dianggap kontroversial karena sebagai anggota Liga Arab, Maroko selalu menunjukkan komitmennya yang kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai contoh, Raja Hassan II berusaha mencapai kesepakatan damai antara Palestina dan Israel dengan memfasilitasi pertemuan antara Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin. Pertemuan tersebut memiliki dampak besar terhadap tercapainya Kesepakatan Oslo I pada tahun 1993 (Ghariani, J., 2021). Maroko juga mendukung resolusi dua negara antara Palestina dan Israel, yang diajukan pada 24 Juni 2002 dalam pertemuan PBB tentang Hak-Hak Palestina di Rabat, Maroko (United Nations, 2002). Pada tahun 2009, Maroko memberikan sumbangan sebesar 15 juta dolar untuk proyek rekonstruksi di Gaza (Relief Web, 2009). Pada tahun 2010, pemerintah Maroko kembali memberikan dukungannya secara penuh terhadap pendirian Palestina sebagai negara yang berdaulat (Sahabatmaroko.com, 2010).

Sehingga normalisasi yang terjadi antara Maroko dan Israel sangat bertolak belakang dengan upaya-upaya yang dilakukan Maroko untuk kemerdekaan Palestina. Maka dari itu, menarik untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi

kepentingan Maroko di balik pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatannya di Sahara Barat melalui normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020.

Kerangka Teori

Konsep Pengakuan Kedaulatan

Istilah kedaulatan pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam karyanya "*Six Livres de Republique.*" Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi suatu negara atau pemerintahan yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.

Menurut Jean Bodin (1500 – 1590), Ada dua jenis kedaulatan yakni:

- a. Kedaulatan ke dalam (intern): Kedaulatan ke dalam merujuk pada kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara untuk mengatur fungsi dan tata kelola pemerintahan. Ini mencakup kemampuan suatu negara untuk mengorganisir dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut.
- b. Kedaulatan ke luar (ekstern): Kedaulatan ke luar merujuk pada kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan melindungi wilayahnya dari ancaman luar. Kedaulatan ke luar melibatkan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga integritas wilayah suatu negara. Pelaksanaan konsep kedaulatan ke luar mencakup aspek-aspek seperti hubungan diplomatik, perjanjian antarnegara, kerja sama perdagangan, dan interaksi sosial dan budaya (Dunning W. A. 1896).

Konsep Kepentingan Nasional

Dalam *British Journal of International Studies* oleh *Cambridge University Press* (1976), Donald E. Nuechterlein memaparkan bahwa *national interest* merupakan kebutuhan serta keinginan suatu negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya yang dihasilkan dari adanya proses politik yang dilakukan oleh suatu negara.

Menurut Donald E. Nuechterlein terdapat 4 klasifikasi kepentingan untuk menentukan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, yaitu:

- a. *Defence interests*, bertujuan untuk melindungi negara beserta warga negara dari ancaman kekerasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak luar baik *state actor* maupun *non-state actor* terhadap sistem pemerintahan di suatu negara.
- b. *Economic interests*, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain.
- c. *World Order interests*, bertujuan untuk memelihara sistem politik internasional dan sistem ekonomi yang mengakibatkan timbulnya rasa aman terhadap suatu negara. Hal ini ditandai dengan bebasnya warga negara maupun korporasi suatu negara yang dapat beroperasi melakukan aktivitas ekonomi secara aman di luar teritori negara asal.
- d. *Ideological interests*, bertujuan untuk melindungi dan melanjutkan serta menyebarkan nilai-nilai maupun ideologi yang dipercayai oleh penduduk suatu negara dan dipercayai memiliki kebaikan secara universal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian pada jurnal ini adalah deskriptif, sebab menjelaskan kepentingan Maroko terhadap pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatannya di Sahara Barat. Adapun jenis data adalah data kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku,

jurnal, maupun artikel-artikel di internet. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini adalah studi pustaka atau *library research*, sehingga data-data yang dihimpun berasal dari literatur terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang telah dihimpun, diolah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menghubungkan data-data yang ada hingga memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Klaim Maroko atas Sahara Barat

Pada Konferensi Berlin tahun 1884-85, Spanyol menegaskan haknya atas sebagian besar wilayah Sahara Barat. Klaim mereka didasarkan pada perusahaan komersial kecil Spanyol di Dakhla, yang saat itu disebut Villa Cisneros, yang merupakan pengembangan dari fasilitas yang didirikan beberapa tahun sebelumnya untuk mendukung operasi penangkapan ikan di Kepulauan Canary. Pada tahun 1912, Perancis dan Spanyol menyepakati perbatasan di wilayah barat laut Afrika mereka. Perancis menguasai Aljazair dan Mauritania dan sebagian besar protektorat Maroko. Secara hukum, protektorat Maroko bukanlah sebuah koloni, karena sultan tetap berkuasa. Kemudian Spanyol menguasai Sahara Spanyol (sekarang Sahara Barat) sebagai koloni penuh Spanyol. Spanyol mendirikan entitas independen Afrika Barat Spanyol, yang terdiri dari tiga bagian yaitu Ifni, Saqiya al Hamra, dan Río de Oro (Jensen, G. 2013).

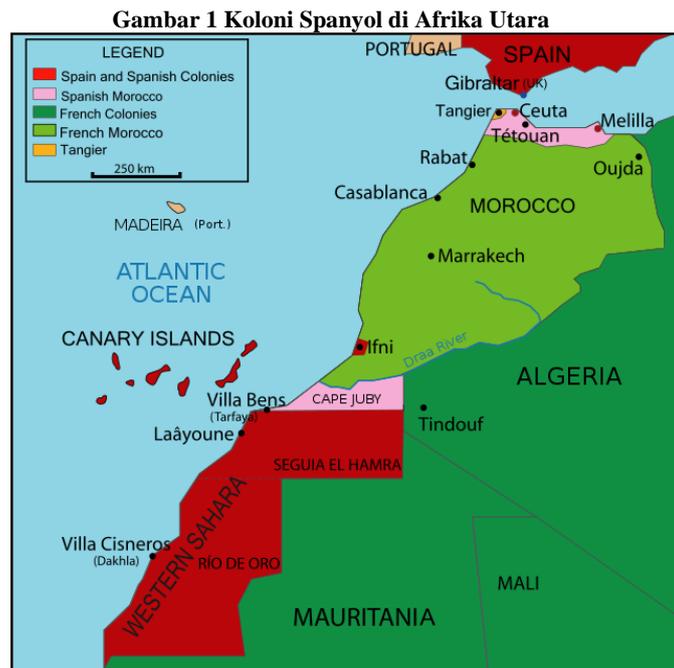
Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1956, Maroko mulai mengklaim wilayah Sahara Spanyol sebagai wilayah kedaulatannya (Jensen, G. 2013). Selanjutnya, dalam kurun waktu 1966-1973, Maroko, Aljazair, dan Mauritania bersekutu dalam upaya membebaskan Sahara Barat dari pendudukan Spanyol. Sehingga Spanyol harus meninggalkan wilayah tersebut, namun harus menghadapi dilema antara memberikan kemerdekaan kepada rakyat Sahrawi yang dianggap belum siap atau membagi wilayah itu dengan Maroko dan Mauritania (James, 1980). Akhirnya Spanyol membagi wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania tanpa melibatkan rakyat Sahrawi melalui *Madrid Accords* pada tahun 1975.

Kepergian Spanyol dari Sahara Barat menjadi awal konflik antara Maroko, Mauritania, dan Front Polisario. Front Polisario yang didirikan pada tahun 1973 sebagai gerakan pembebasan atas pendudukan Spanyol di Sahara Barat berhasil menduduki beberapa posisi mereka dan menyerang pasukan Maroko dan Mauritania. Pada bulan Februari 1976, ketika Spanyol secara resmi mengakhiri kehadirannya di Sahara Barat, Front Polisario memproklamkan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR), dan pasukannya terus melancarkan serangan gerilya terhadap jalur pasokan serta sasaran ekonomi dan militer Maroko dan Mauritania. (Jensen, G. 2013). Mauritania mundur dari perebutan Sahara Barat pada tahun 1979 dikarenakan banyaknya tekanan dari luar dan mendominasinya pergerakan dari Maroko (Maddy Weitzman, 1991). Konflik terus berlanjut antara Maroko dan Front Polisario hingga pada tahun 1991, ketika kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB (MIKOŁAJCZYK. A,K. 2020.)

Maroko pertama kali mengklaim wilayah Sahara Barat melalui Raja Mohammed V setelah mendapatkan kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1956 (BBC, 2023). Pada tahun 1979 ketika Mauritania mundur dari perebutan Sahara Barat, Raja Hassan II segera mencaplok wilayah Mauritania yang ada di Sahara Barat sebagai bentuk klaim Maroko atas wilayah itu (Weinstein, 1980). Selanjutnya, Raja Mohammed VI secara

konsisten juga mengklaim wilayah Sahara Barat dengan dasar yang digunakan untuk mengklaim wilayah itu yakni wilayah Sahara Barat dulunya memang sebagai wilayah kekuasaan dari kerajaan Maroko hingga masuknya Spanyol dan Perancis ke wilayah Afrika Utara yang membuat kendali Maroko terhadap Sahara Barat menjadi lemah (R. Michael, 2015).

Fakta sejarah yang digunakan Maroko sebagai landasan untuk mengklaim Sahara Barat dimulai sejak awal abad ke-11 yaitu tahun 1040, ketika orang-orang Maroko mulai mengeksplorasi Sahara Barat. Eksplorasi ini dimulai pada era Dinasti Almoravid dan berhasil menaklukkan Sahara Barat. Mereka mengalahkan suku-suku Berber yang sebelumnya menguasai wilayah itu dan menyatukan wilayah tersebut di bawah pemerintahan mereka. Sehingga wilayah Sahara Barat menjadi bagian dari kesultanan Berber yang terletak di Maroko dengan ibukotanya di Marrakesh. Almoravid memperkenalkan agama Islam dan budaya Arab ke Sahara Barat yang memiliki dampak mendalam pada wilayah tersebut. Almoravid memerintah Sahara Barat hingga 1147, kemudian digantikan oleh Dinasti Almohad. Pada eranya Sahara Barat tetap dibawah kendali orang-orang Maroko dan terus berlanjut ke era Marinid, Saadid, hingga akhirnya ke dinasti Alawiya. Pada tahun 1631 Dinasti Alawiya yang berkuasa di kerajaan Maroko terus memerintah Maroko hingga saat ini melalui Raja Mohammed VI yang secara konsisten mengklaim kedaulatan Maroko atas Sahara Barat (R. Michael, 2015).



Sumber: https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Koloni_Spanyol_29527

Maroko mengklaim seluruh wilayah yang dulunya merupakan wilayah koloni Spanyol. Lebih tepatnya wilayah Segouia el Hamra dan Rio de Oro yang berhasil disatukan oleh Spanyol menjadi satu provinsi yaitu Sahara Spanyol, karena wilayah Ifni telah dikembalikan oleh Spanyol kepada Maroko pada tahun 1969 melalui perjanjian Fez. Sementara itu Front Polisario menuntut adanya negara merdeka dan membangun pemerintahan sendiri di wilayah yang sama yaitu Sahara Spanyol, yang kemudian berubah nama menjadi Sahara Barat setelah Spanyol meninggalkan wilayah itu pada tahun 1975. (Jensen, G. 2013). Kedua pihak mengklaim wilayah yang sama pada wilayah yang dulunya bekas koloni Spanyol, akhirnya membuat kedua pihak yaitu

Maroko dan Front Polisario terus berkonflik dan belum mencapai kesepakatan untuk bersatu.

Selama 16 tahun Maroko dan Front Polisario terus berkonflik secara terbuka, hingga pada tahun 1991. Kedua pihak sepakat berhenti dengan melakukan gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB. Salah satu tujuannya untuk memberikan kebebasan bagi wilayah koloni untuk memungkinkan diadakannya referendum penentuan nasib sendiri bagi penduduknya. Namun hingga saat ini referendum tersebut masih belum terlaksana dan Maroko tetap melakukan integrasi Sahara Barat dengan wilayahnya sendiri sebagai bentuk upaya penyatuan Sahara Barat kedalam wilayah kedaulatannya (Portal Amelica, 2020). Meskipun pada dasarnya status Sahara Barat merupakan subjek dari konflik yang kompleks dan belum terselesaikan sehingga masih belum jelas statusnya. Wilayah ini bukan merupakan negara merdeka, tetapi juga bukan sepenuhnya bagian dari Maroko. Secara *de jure* wilayah ini diakui PBB sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan yang sedang menunggu referendum, namun secara *de facto* Maroko mengendalikan sebagian besar wilayah tersebut.

Normalisasi Hubungan Maroko-Israel Tahun 2020 dan Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Kedaulatan Maroko di Sahara Barat

Pada tahun 2020, sebagai upaya lanjutan untuk menguasai kembali Sahara Barat, Maroko melakukan serangkaian diplomasi yang akhirnya menyepakati tawaran normalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan akan diakuinya kedaulatan Maroko oleh Amerika Serikat terhadap Sahara Barat. Hal ini menjadi upaya yang signifikan dikarenakan sebelumnya tidak ada negara yang mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah itu. Pada saat yang sama, keterbukaan Maroko terhadap Israel juga memiliki akar sejarah, budaya, agama, dan bahkan pribadi yang mendalam. Ikatan khusus menyatukan kedua negara, sebagian bertumpu pada komunitas Yahudi Maroko. Meskipun komunitas tersebut tidak terlibat langsung dalam perjanjian normalisasi ini, namun, pernyataan dari para pejabat Maroko bahwa warisan minoritas Yahudi di negara tersebut menjadi latar belakang hubungan dengan Israel lebih dari sekadar retorika (Chatatou, M. 2021). Hubungan antara Maroko dan Israel sudah terjalin sejak lama bahkan sebelum pendirian Israel pada tahun 1948. Dimana hubungan tersebut masih bersifat informal hanya sebatas hubungan masyarakat Maroko dengan komunitas Yahudi yang telah terjalin sejak akhir abad ke-15M (Ilham, M. & Paksi, A.K., 2021).

Pada akhir masa Reconquista (penaklukan kembali Spanyol), Maroko menjadi tempat pengungsian bangsa Yahudi yang diusir bersama Muslim Spanyol. Tercatat hingga tahun 1950-an populasi Yahudi sekitar 300.000 orang dari 8 juta populasi penduduk Maroko. Hingga akhirnya bermigrasi secara massal ke Israel dan sekitar 5000 orang Yahudi memilih bertahan di kota komersial Maroko, Kasablanka, dan juga kota-kota kecil lainnya seperti kota Sefrou (Chatatou M. 2021). Pada kurun waktu 1948-1973 warga Yahudi di Maroko melakukan migrasi massal ke Israel dimana masyarakat Maroko menyayangkan kepergian warga Yahudi di negara tersebut. Hal ini diilustrasikan secara luar biasa dalam sebuah film dokumenter berjudul "*Tinghir-Jerusalem, gema Mellah,*" yang dibuat oleh Kamal Hachkar dan diputar di seluruh dunia. Secara resmi, sejak masa mendiang raja Hassan II, semua orang Yahudi Maroko yang keluar masih memiliki kewarganegaraan Maroko dan dapat kembali ke negara tersebut kapanpun mereka mau. Sehingga dengan adanya hubungan yang panjang tersebut antara negara Maroko dan komunitas Yahudi menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya normalisasi ini.

Pada tingkat pemerintahan, Maroko dan Israel pernah melakukan perjanjian normalisasi pada tahun 1993, kemudian terputus akibat intifada kedua yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina pada tahun 2000. Barulah di tahun 2020, Maroko dan Israel sepakat menormalisasi kembali hubungan diplomatiknya. Secara keseluruhan, normalisasi Maroko dan Israel di tahun 2020 adalah peristiwa yang lebih penting daripada normalisasi tahun 1993. Normalisasi tahun 2020 tidak hanya mengakhiri hubungan diplomatik yang terputus selama 27 tahun, tetapi juga mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat (Singer, 2021).

Arti Penting Pengakuan Amerika Serikat

Berdasarkan konsep kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin yaitu kedaulatan keluar yang merujuk pada kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain dan melindungi wilayahnya dari ancaman luar dan salah satu implementasinya adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain (Dunning W. A. 1896). Dalam kasus ini demi melindungi dan menjaga Sahara Barat Maroko menjadikan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel sebagai jalan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan yang diperlukan untuk memperkuat klaimnya disana.

Setelah melakukan normalisasi dengan Israel, Amerika Serikat memenuhi janjinya untuk memberikan pengakuan kedaulatan bagi Maroko atas Sahara Barat. Dimana bentuk pengakuan tersebut berupa surat yang di berikan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Surat tersebut disampaikan oleh Perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Kelly Craft, kepada Presiden DK PBB, Jerry Matthews Matjila, dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Surat yang berisi tanggal 15 Desember 2020, memperlihatkan Trump telah mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat pada 10 Desember 2020. Surat tersebut juga menyatakan bahwa "Proposal otonomi Maroko adalah satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa wilayah Sahara Maroko (Gunawan, S. M. 2020)

Sejalan dengan ambisi Maroko yang sangat ingin mempertahankan Sahara Barat dan tidak sekali pun membiarkan pengaruh dari luar masuk. Tentu hal itu membutuhkan dukungan dan *power* dari negara-negara lain. Alasan itulah yang kemudian membuat Maroko mau menerima normalisasi hubungan dengan Israel. Selain itu, normalisasi tersebut juga akan memberikan dukungan penuh dari Israel dan Amerika Serikat pada berbagai aspek termasuk masalah Sahara Barat (Singer, 2021). Berkaitan dengan Sahara Barat, tentu Maroko perlu adanya negara yang mengakui kedaulatannya di wilayah itu yang telah lama menjadi persoalan dengan Front Polisario. Selain itu, pengakuan yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan pengakuan pertama untuk Maroko terhadap klaim kedaulatannya di Sahara Barat. Tentu hal itu akan meningkatkan legitimasi Maroko di forum internasional dan dapat memperkuat kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut. Jika masyarakat dunia internasional mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, maka hal ini akan lebih sulit bagi Front Polisario dan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat untuk menggulingkan Maroko. Apalagi Amerika Serikat sebagai negara *super power* yang akan menjadi aktor dengan peran sentral disana, sehingga menarik negara-negara lain nantinya untuk mengikuti jejaknya mengakui kedaulatan Maroko di Sahara Barat.

Kepentingan Nasional Maroko di Sahara Barat

Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat tentu saja memberikan Maroko keuntungan dalam mempertahankan klaimnya di Sahara Barat. Dengan begitu Maroko akan lebih leluasa mengelola wilayah tersebut dan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya disana.

A. *Defence Interest*

Dari data yang penulis peroleh saat ini Maroko dihadapkan oleh dua ancaman keamanan terkait kedaulatannya pada persoalan Sahara Barat. Ancaman tersebut datang dari Front Polisario yang menyatakan untuk mengakhiri gencatan senjata dengan Maroko yang telah berlangsung selama 29 tahun. Hal itu terjadi pada November 2020, sebulan sebelum normalisasi antara Maroko dan Israel. Berakhirnya kesepakatan gencatan senjata tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan Front Polisario terhadap kebuntuan politik yang telah berlangsung puluhan tahun di Sahara Barat. Selain itu, alasan tindakan yang diambil Front Polisario juga disebabkan oleh adanya insiden di Guerguerat, yang mana pihak Front Polisario menuduh pasukan Maroko telah melewati batas jalur zona penyangga di daerah tersebut (Chograni, H. 2021).

Sejak runtuhnya kesepakatan gencatan senjata pada 13 November 2020, Front Polisario kembali aktif dalam perjuangan bersenjata melawan Maroko. Maroko dan Front Polisario telah terlibat konfrontasi bersenjata dengan melepaskan tembakan provokatif di sepanjang garis perbatasan. Dua hari kemudian, Front Polisario mengumumkan konflik berlanjut sengit di tembok pertahanan Maroko yang membelah kawasan Sahara Barat tersebut. Front Polisario kemudian juga menyatakan bahwa mereka telah memobilisasi “ribuan sukarelawan” untuk turut bergabung dengannya (Arabnews, 2020).

Kedua adalah keterlibatan Aljazair dalam persengketaan Sahara Barat yang telah menegaskan posisinya sebagai pendukung utama Front Polisario. Aljazair menyediakan kamp pengungsi bagi pengungsi Front Polisario, memasok persenjataan, serta mendukung referendum kemerdekaan wilayah Sahara Barat sambil menentang upaya aneksasi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya itu, Aljazair juga mau menerima dengan baik penduduk-penduduk Sahara Barat yang terdampak untuk mengungsi di negaranya (Ariyati, 2020). Bagi Aljazair, persengketaan Sahara Barat merupakan upaya untuk menghadang ekspansionisme yang dilakukan oleh Maroko.

Sehingga dari dua ancaman tersebut tentu saja akan sangat berdampak buruk pada wilayah kedaulatan Maroko. Oleh karena itu, Maroko menjalin kerjasama dengan negara-negara *super power* seperti Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan politik dan militer yang ada di Sahara Barat karena keberadaan Aljazair yang telah lama mensuplai berbagai pasokan perang kepada Front Polisario. Sebagai respon, pemerintah Maroko meningkatkan pertahanan militernya mengingat keikutsertaan Aljazair menjadi persoalan yang penting bagi kedaulatannya di Sahara Barat selain Front Polisario. Maroko mengalokasikan anggaran sebesar \$17 miliar untuk pertahanan pada tahun 2022. Anggaran tersebut digunakan untuk tujuan interoperabilitas dengan Amerika Serikat dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), dengan memodernisasi peralatan angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan lautnya (Latrech, O. 2022.)

Maroko telah menghabiskan \$20 miliar untuk tujuan strategisnya berupa modernisasi dan interoperabilitas dan telah mengguguli Arab Saudi dengan kesepakatan senilai hingga \$10,3 miliar. Penjualan militer Amerika Serikat ke Maroko meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2020, tumbuh dari \$4,01 miliar menjadi nilai penjualan akhir saat ini sebesar \$8,5 miliar. Selain itu, Maroko adalah importir senjata utama terbesar ke-29 pada tahun 2022, menurut laporan dari *Stockholm*

International Peace Research Institute (SIPRI). Laporan tersebut menunjukkan bahwa Maroko mengimpor 76% senjatanya dari Amerika Serikat, diikuti oleh Perancis (15%), dan Tiongkok (6,8%) (*International Trade Administration.gov*, 2024).

Upaya yang dilakukan Maroko dalam meningkatkan kapasitas militernya sejalan dengan kepentingan Maroko untuk mempertahankan Sahara Barat sebagai wilayah kedaulatannya. Kekuatan militer tersebut berperan penting dalam konflik Sahara Barat antara Maroko dengan Front Polisario dan Aljazair. Angkatan Darat Maroko telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Sahara Barat. Hal ini menjadi kemenangan yang besar bagi Maroko pada konflik di Sahara Barat serta keikutsertaan Amerika Serikat setelah normalisasi di tahun 2020 telah membawa dampak yang signifikan bagi posisi Maroko disana.

B. Economic Interest

Wilayah Sahara Barat memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan menjadi nilai jual yang berharga bagi Maroko. Tambang fosfat, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) menjadi yang cukup signifikan memberikan dampak ekonomis bagi Maroko. Saat ini Maroko merupakan salah satu eksportir fosfat terbesar di dunia dan sektor ini telah menyumbangkan 10% Produk Domestik Bruto (PDB) Maroko dimana 90% diantaranya adalah fosfat. Selain itu, Maroko memiliki cadangan batuan fosfat sekitar 75% dari cadangan batuan fosfat dunia (*CRUGroup.com*, 2023). Hal itu menjadikan sektor pertambangan di Maroko sangat penting untuk dikembangkan. Sebagai informasi, mineral fosfor penting untuk teknologi hijau seperti baterai mobil listrik, panel surya, dan chip komputer. (*Lestari. H. P.* 2023). Dengan dikuasainya sekitar 80% dari wilayah Sahara Barat secara keseluruhan, membuat Maroko memiliki akses untuk mengelola sektor pertambangan disana yang sebagian besar berfokus pada pertambangan batuan fosfat. Hal itu membuat Maroko memiliki cadangan fosfat terbesar kedua di dunia, yang terletak di wilayah Bou Craa di Sahara Barat. Cadangan fosfat ini diperkirakan mencapai 1,7 miliar ton (*Hodges T*, 1994). Sehingga penambangan fosfat di Sahara Barat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Maroko. Pada tahun 2022, ada beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor Maroko antara lain India, Meksiko, Selandia Baru, serta pengiriman lebih kecil ke Filipina, Australia, dan Israel. Kemudian mulai tahun 2022, pabrik pupuk dan pelabuhan baru sedang dibangun di wilayah Sahara Barat (*WSRW*, 2023). Hal ini mungkin akan meningkatkan keuntungan Maroko dari tambang tersebut di tahun-tahun mendatang.

Selain batuan fosfat yang telah dimanfaatkan oleh Maroko, Sahara Barat juga memiliki potensi energi surya. Energi surya di Sahara Barat memberikan Maroko keuntungan yang besar sebagai pengelola wilayah tersebut. Sebelumnya Maroko memiliki rencana untuk menghasilkan 2.000 megawatt (atau 2 gigawatt) tenaga surya pada tahun 2020 dengan membangun proyek tenaga surya skala besar di lima lokasi yaitu Laayoune (Sahara Barat), Boujdour (Sahara Barat), Tarfaya (selatan Agadir), Ain Beni Mathar (tengah) dan Ouarzazate dengan mekanisme panas matahari modern, fotovoltaik, dan tenaga surya terkonsentrasi. Dua dari lima lokasi tersebut merupakan wilayah Sahara Barat yang saat ini dikuasai oleh Maroko. Selain itu, rencana maroko tersebut merupakan rencana energi surya terbesar dan paling ambisius di dunia dengan investasi sebesar USD 9 miliar. Rencana tenaga surya Maroko dianggap sebagai tonggak sejarah negara tersebut menuju pasokan energi yang aman dan berkelanjutan, bersih, ramah lingkungan, dan terjangkau (*NDCPartnership.org*, 2016).

Selanjutnya Maroko juga mengembangkan pembangkit Listrik tenaga angin yang berada di Sahara Barat. Salah satu pemanfaatannya digunakan untuk 95% energi yang dibutuhkan perusahaan fosfat milik negara Maroko, OCP, dalam mengeksploitasi cadangan fosfat tak terbarukan di Sahara Barat di Bou Craa yang berasal dari kincir angin. Energi terbarukan dihasilkan oleh 22 turbin angin Siemens di pembangkit listrik Foam el Oued berkapasitas 50 MW, yang beroperasi sejak 2013 dan Peternakan angin Aftissat, yang beroperasi sejak 2018. Saat ini, ada tiga ladang angin yang beroperasi di Sahara Barat yang keempat sedang dibangun, sementara beberapa lainnya sedang dalam tahap perencanaan. Jika digabungkan, pembangkit listrik tenaga angin ini akan memiliki kapasitas lebih dari 1000 MW. Pada tahun 2020 terjadi kemajuan lebih lanjut dalam rencana Maroko untuk membangun taman kincir angin raksasa berkapasitas 900 MW di Dakhla, untuk tujuan penambangan bitcoin online. Pada bulan September 2021, anak perusahaan perusahaan Amerika General Electric mengumumkan penandatanganan kontrak untuk pengembangan taman Aftissat 2 berkapasitas 200 MW. Pada Oktober 2021, muncul kabar bahwa perusahaan Belgia-Belanda, Windvision, akan membangun pembangkit listrik tenaga angin di dekat Dakhla (WSRW, 2022).

Dengan adanya serangkaian proyek-proyek tersebut yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan membuat Maroko memiliki alasan baru untuk menguasai Sahara Barat. Energi terbarukan sangat penting mengingat penggunaannya yang diperuntukkan dalam operasional pertambangan dan industri-industri lainnya yang dimiliki Maroko. Oleh karena itu Maroko membuat dirinya bergantung pada proyek-proyek energi di wilayah yang didudukinya, dan dengan demikian mempertahankan kehadiran militernya di sana.

Sehingga berdasarkan dua kepentingan Maroko di Sahara Barat yaitu *defence interest* dan *economic interest*, pengakuan kedaulatan yang diberikan oleh Amerika Serikat memberikan kekuatan bagi Maroko atas klaimnya pada wilayah itu. Pengakuan Amerika Serikat dapat membantu Maroko dalam meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi tekanan dari negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat. Sebagai contoh, pengakuan Amerika Serikat dapat membantu Maroko dalam meningkatkan kemampuan militernya sebagai upaya menghadapi tekanan dari Aljazair yang mendukung kemerdekaan Sahara Barat. Peningkatan itu dilakukan dalam bentuk kerjasama militer antara Maroko dan Amerika Serikat. Selanjutnya dengan modal pengakuan Amerika Serikat maroko lebih berani untuk membangun serangkaian proyek proyek yang ada di Sahara Barat. Sehingga dengan adanya peningkatan eksploitasi ekonomi di sahara barat merupakan dampak dari pengakuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Oleh karena itu, Sahara Barat akan terus berada di bawah kendali Maroko sebagai negara yang mengelolanya walaupun tidak diakui di dunia namun adanya pengakuan tersebut perlahan akan menarik negara-negara lain untuk ikut menerima klaim Maroko seperti yang dilakukan oleh Israel pada 17 Juli 2023 (Aljazeera, 2023).

Kesimpulan

Hubungan sejarah dan budaya yang kuat antara Maroko dan Sahara Barat menjadi landasan yang digunakan Maroko untuk menyatukan keduanya. Maroko mengklaim Sahara Barat berdasarkan fakta Sejarah bahwa memang dinasti-dinasti dari Maroko telah menguasai wilayah yang saat ini adalah Sahara Barat sebagai bagian dari wilayahnya sebelum adanya invasi bangsa Eropa ke Afrika Utara. Maroko yang sangat berambisi untuk menguasai Sahara Barat melakukan berbagai upaya demi menjaga wilayah Sahara Barat dari pengaruh luar dimana salah satu upaya tersebut ialah

melakukan normalisasi dengan Israel pada tahun 2020. Normalisasi ini memberikan banyak keuntungan bagi Maroko terutama pada kedaulatannya di Sahara Barat. Dengan demikian, normalisasi hubungan itu dijadikan sebagai jalan bagi Maroko untuk menegaskan kembali klaimnya atas Sahara Barat melalui pengakuan kedaulatan dari Amerika Serikat.

Kegigihan Maroko dalam mempertahankan Sahara Barat membawa kita pada kenyataan bahwa Sahara Barat merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, selain ingin menyatukan wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Maroko demi memperkuat politik Maroko di kawasan Afrika Utara, Maroko juga ingin memperoleh keuntungan secara ekonomis dengan mengelola sumber daya alam yang tersedia di Sahara Barat, karena sekitar 80% wilayah Sahara Barat dibawah kekuasaan Maroko.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. 2023. Israel Recognises Western Sahara As Part of Morocco. dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/7/17/israel-recognises-western-sahara-as-part-of-morocco>, diakses pada 22 Maret 2024.
- Africa News. 2023. "Aljazair, Maroko berdebat soal Sahara Barat di siding PBB" dalam <https://www.africanews.com/2023/09/27/algeria-morocco-spar-over-western-sahara-at-un/>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Anthony G. Pazzanita; Tony Hodges. 1994. "Bou-Craa". Historical Dictionary of Western Sahara. Scarecrow Press. p. 79. ISBN 978-0-8108-2661-8.
- Arab News. 2020. "Morocco's King Warns Polisario after Rivals Clash in W.Sahara". dalam [Morocco's king warns Polisario after rivals clash in W.Sahara | Arab News](#), diakses pada 20 Januari 2024.
- Ariyati. 2020. Analisa Konflik Wilayah Sahara Barat dan Upaya Resolusi Konflik [West Sahara Conflict Analysis and resolution Effort. International Relations Journal.
- BBC. 2023. Western Saharan profile. dalam <https://www.bbc.com/news/world-africa-14115273#:~:text=1957%20%2D%20Newly%20independent%20Morocco%20lays,Sahrawi%20independence%20movement%2C%20is%20founded>, diakses pada 20 April 2024.
- Brian Weinstein. 1980. "The Western Sahara", Current History, vol. 78, no. 455, hal. 114
- Chograni, Houda. 2021. "The Polisario Front, Morocco, and the Western Sahara Conflict." Arab Center Washington DC. June 22, 2021. dalam <https://arabcenterdc.org/resource/the-polisario-front-morocco-and-th>, diakses pada 20 Januari 2024.
- CRU Group. 2023. Maroko Penggerak Pasar Fosfat. dalam <https://www.crugroup.com/knowledge-and-insights/insights/2023/morocco-mining-indaba-a-significant-phosphates-producer/>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Dunning, W. A. 1896. Jean Bodin on sovereignty. *Political Science Quarterly*, 82-104.
- Gunawan, S. M. 2020. Surat Amerika Untuk Proklamasikan Kedaulatan Maroko atas Sahara Maroko. dalam <https://rmol.id/dunia/read/2020/12/18/466524/surat-amerika-untuk-proklamasikan-kedaulatan-maroko-atas-sahara-maroko>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Ilham, M. 2023. *Transaksionalisme Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Maroko-Israel* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

- International Trade Administration. 2024. Panduan Komersial Negara Maroko - Keselamatan dan Keamanan. dalam <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/morocco-safety-and-security>, diakses pada 20 Januari 2024.
- James Dougherty. 1980. "The Polisario Insurgency: War and Minuet in North-West Africa", *Conflict*, vol. 2, no. 2, hal. 95.
- Latrech O. 2022. Kekuatan Militer Maroko Peringkat ke-55 Sedunia. Morocco World News. dalam <https://www.morocoworldnews.com/2022/01/346643/morocco-military-power-ranks-55th-worldwide>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Lestari. H. P. 2023. 10 Negara Pengelola Fosfat Terbanyak Dunia, Cadangan di Norwegia Belum Ada Apa-apanya?. dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230709/44/1673001/10-negara-pengelola-fosfat-terbanyak-dunia-cadangan-di-norwegia-belum-ada-apa-apanya>, diakses pada 20 Januari 2024.
- MIKOŁAJCZYK. A.K. 2020. Status of Western Sahara. Portal Amelica. dalam <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/463/4632029003/html/index.html>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Mohamed Chtatou. 2020. *The Moroccan-Israeli Geostrategic Relationship: From a Harmonious Past to a Promising Future*, *Orbis*, Volume 67, Issue 2, 2023, Pages 228-246, ISSN 0030-4387, <https://doi.org/10.1016/j.orbis.2023.03.006>.
- NDC Partnership. 2016. Programa tenaga surya Maroko. dalam <https://ndcpartnership.org/knowledge-portal/good-practice-database/morocco-solar-program>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Oxford Business Group. 2016. Sektor pertambangan di Maroko melakukan diversifikasi dari Fosfat. dalam <https://oxfordbusinessgroup.com/reports/morocco/2016-report/economy/new-tricks-having-traditionally-relied-on-the-phosphates-industry-the-mining-sector-is-diversifying>, diakses pada 20 Januari 2024.
- Western Sahara Resources Watch. 2022. Energi Hijau Kotor di Lahan yang diduduki. dalam <https://wsrw.org/en/news/renewable-energy>, diakses pada 16 Januari 2024.
- Western Sahara Resources Watch. 2023. Konflik fosfat - penjarahan selama empat decade. dalam <https://wsrw.org/en/news/the-phosphate-exports>, diakses pada 20 Januari 2024.